



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 7, Tarempa Selatan Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791 Laman Anambaskab.go.id pos-el dpuprprkp@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 03 TAHUN 2026

T E N T A N G

**TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi perangkat daerah perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam daftar pengelolaan anggaran belanja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi perangkat daerah sebagaimana tersebut butir a diatas perlu ditunjuk dan diangkat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipandang mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut butir a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b diatas, dipandang perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

- Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 626);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 626);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : **Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :**

- a) Menyusun perencanaan pelaksanaan pengadaan;
- b) Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c) Menetapkan rancangan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- e) Mengusulkan jadwal perubahan kegiatan;
- f) Menetapkan Tim Pendukung/Tenaga Ahli;
- g) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h) Menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i) Mengendalikan kontrak;
- j) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kinerjanya kepada PA/KPA;
- k) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan 100% kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan (BAST);
- l) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meliputi :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : **Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :**

- a) Membantu PA/KPA mengendalikan pelaksanaan kontrak/kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan progres kegiatan kepada PA/KPA;
- c) Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan PA/KPA;
- d) Membantu PA/KPA, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- e) Membantu PA/KPA menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DINAS, N.

ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19820701 201001 1 019

TEMBUSAN

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Pejabat Pengadaan Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
7. Bendahara Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 03 Tahun 2026
 Tanggal : 27 Januari 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PPK UNIT KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN,ST NIP. 19820701 201001 1 019	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <p>Program Penyelenggaraan Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota <p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota <p>Program Penatagunaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hambarannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/kota <p>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>

2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	DONI NOVIANDI, ST/ NIP. 19841121 201404 1 001	Penata TK.I (III/d)	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota - Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/kota <p>Program Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha <p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
					<p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota <p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)</p>

					<p>- Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;</p> <p>- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	--	---

KEPALA DINAS,



ANDY GUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19820701 201001 1 019

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 03 Tahun 2026
 Tanggal : 27 Januari 2026

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK) PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBASTAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	INDRA S.Hut.,M.H /NIP. 19810923 200502 1 004	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.	WAN IWAN DARMAWAN, S.M/ 19880716 201404 1 001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3.	ARIF GUNAWAN, ST/ NIP.19860217 201902 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPAM	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4.	TRI ROBERTO,ST/ NIP. 19901116 202202 1 001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Program Penataan Bangunan Gedung; <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan

				Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
5.	MUHAMMAD EFENDI, ST,M.Eng /NIP.19900107 201404 1 001	Penata TK.I (III/d)	Kepala Bidang Cipta Karya	<p>▪ Program Penataan Bangunan Gedung;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota :
6.	LEKA KHOMALRIAH, S.ST/NIP.19940402202012 2015	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>▪ Program Penataan Bangunan Gedung;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
7.	MARWAN,ST/ NIP. 19880303 202012 1 011	Penata Muda (III/a)	Analisis Bangunan Gedung dan Perumahan	<p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Sampahan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan di Daerah Kabupaten/Kota; <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;

				<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Jaringan Perpipaan
8.	ARDELIANA, S.Si/ NIP. 19871206 201902 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/kota
9.	MIRWAN, S.Ars/ NIP. 19901130 202012 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
11.	ARJAFARI, ST/ NIP.19871021 201902 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Teknik Jalan dan Jembatan	<p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

				<p>Program Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
12.	ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST, M.H/ NIP. 19890611 201404 1 001	Penata TK.I (III/d)	Kepala Bidang Bina Marga	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Pembangunan Jalan ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
13.	WILDAN HALIM, S.Tr.T/ NIP.19980310 202202 1 002	Penata Muda (III/a)	Teknik Pengairan	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan ✓ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
14.	SYOLIHINSYAH,S.E/ NIP. 19840623 201101 1 003	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan ✓ Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
15.	ARI SUPRIYONO, S.Sos NIP. 19820421 201001 1 019	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	<p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota

				Program Penatagunaan Tanah - Kegiatan Penggunaan Hamparannya Dalam Kabupaten/kota Tanah Satu Daerah Yang
--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,


ANDYGUNYA KURNIAWAN HASIBUAN,ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820701 201001 1 019